

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka memberikan penjelasan mengenai teori yang berkaitan dengan variabel penelitian dari hasil penelitian sebelumnya dan publikasi umum. Adapun kajian pustaka yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

2.1.1 Teori Federalisme Fiskal (*Fiscal Federalism*)

Teori federalisme fiskal dapat diartikan sebagai teori yang menjelaskan mengenai hubungan desentralisasi dengan perekonomian, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Federalisme fiskal memberikan gambaran pemerintah pusat yang menjadi penafsir aspirasi masyarakat, yang memberikan arahan dalam aturan-aturan kelembagaan antar pemerintahan agar lembaga-lembaga pemerintah daerah bertindak sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat (Haryanto, 2019).

Federalisme fiskal memberikan fungsi untuk memisahkan bagaimana penerimaan pendapatan dan rancangan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah seperti pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keduanya memiliki hak, kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda dalam mengelola keuangan yang diterima maupun dibelanjakan.

Federalisme fiskal merupakan salah satu unit asas pedoman yang ditetapkan dalam suatu negara maupun daerah yang memiliki manfaat untuk mempersiapkan keuangan tingkat nasional dan pemerintahan daerah. Pelaksanaan federalisme fiskal diterapkan pada negara yang menerapkan sistem desentralisasi fiskal dalam sistem pemerintahannya. Maksud dari konsep federalisme fiskal yaitu Pemerintahan tingkat II (kabupaten/kota) atau negara bagian yang berbentuk federal menjadikan pemerintah pusat atau pemerintahan negara bukan seperti pelaksana otonom.

Hubungan teori federalisme fiskal dengan penelitian ini yaitu teori federalisme fiskal memberikan gambaran bagaimana pemerintah pusat membuat rancangan alokasi anggaran yang akan diberikan ke daerah sehingga dapat digunakan sebagai pendapatan bagi pemerintah daerah dan dapat melaksanakan program daerah seperti rencana yang telah dibuat sebelumnya. Pemerintah daerah dianggap dapat lebih baik dalam melakukan pengelolaan keuangan daerahnya dikarenakan lebih memahami bagaimana keadaan daerah tersebut seperti letak geografis, kebutuhan masyarakat, dan cara masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adanya kebijakan desentralisasi diharapkan dapat membangun dan meningkatkan kualitas daerah otonom dengan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pengelolaan keuangan yang maksimal agar tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.

2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian dari hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang sebelumnya telah ditetapkan melalui kebijakan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan (Siregar, 2020). Selain kinerja keuangan, kinerja pemerintah daerah juga bisa dilihat dari kinerja makro dan kinerja program. Kinerja keuangan dapat dilakukan dengan secara rinci melalui analisis laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan terdiri dari:

- a. Laporan Pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*)
 - Laporan Realisasi Anggaran
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- b. Laporan Finansial
 - Neraca
 - Laporan Operasional (LO)

- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - Laporan Arus Kas (LAK)
- c. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

2.1.2.1 Teknik Analisis Laporan Keuangan

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat melalui laporan keuangan neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas. Teknik Analisis Laporan Keuangan ada bermacam-macam, seperti (Mahmudi, 2019):

- a. Analisis Varians (Selisih)
- b. Analisis Rasio Keuangan
- c. Analisis Pertumbuhan (*Trend*)
- d. Analisis Regresi
- e. Analisis Prediksi

Analisis akun-akun yang terdapat dalam laporan keuangan dapat dilihat melalui akun-akun berikut ini:

1. Analisis Aset
2. Analisis Kewajiban dan Ekuitas
3. Analisis Pendapatan
4. Analisis Belanja
5. Analisis Pembiayaan

Penelitian ini menggunakan akun pendapatan sebagai akun yang akan diteliti. Melalui akun pendapatan terdapat beberapa cara untuk melakukan analisis pendapatan daerah antara lain:

1. Analisis varians (selisih) anggaran pendapatan
2. Menghitung pertumbuhan pendapatan daerah, meliputi:
 - Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
 - Pertumbuhan Pajak Daerah
 - Pertumbuhan Retribusi Daerah
 - Pertumbuhan Pendapatan Transfer
3. Menghitung rasio keuangan, meliputi:
 - Kemandirian Daerah
 - Ketergantungan Keuangan Daerah
 - Desentralisasi Fiskal
 - Efektivitas PAD
 - Efisiensi PAD
 - Efektivitas Pajak Daerah
 - Efisiensi Pajak Daerah
 - Derajat Kontribusi BUMD
 - Kemampuan Mengembalikan Pinjaman (Debt Service Coverage Ratio)
 - Utang Terhadap Pendapatan

2.1.3 Desentralisasi Fiskal

2.1.3.1 Pengertian Desentralisasi Fiskal

Beberapa pengertian Desentralisasi Fiskal menurut para ahli, adalah sebagai berikut:

“Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi, di mana apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka harus mendapat dukungan dari pemerintah pusat berupa subsidi/bantuan maupun pinjaman dari pemerintah pusat serta sumber-sumber keuangan yang memadai.” (Nadeak et al., 2022)

“Desentralisasi fiskal adalah sebuah konsep dinamis dalam keuangan publik yang berkaitan dengan alokasi kekuasaan perpajakan dan belanja di antara berbagai tingkat pemerintahan dalam suatu sistem politik.” (Triwiyanto & Kusumaningrum, 2024)

“Desentralisasi fiskal memiliki kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi berdasarkan pendapatan dan otonomi pengeluaran untuk pemerintah daerah. Untuk mendapatkan pendapatan yang akan di belanjakan diperlukan peningkatan otonomi pendapatan, membangun kapasitas analisis data untuk keputusan anggaran, dan membangun kontrol yang tepat.” (Prasetyo, 2023)

“Desentralisasi fiskal merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara satu daerah dengan daerah lainnya.” (Ernita, 2024)

“Desentralisasi fiskal adalah pembagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengambil keputusan fiskal.”(Nazikha & Rahmawati, 2021)

“Desentralisasi fiskal merupakan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan di tingkat daerah sampai kepada pengaturan keuangan atau ranah fiskal. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengatur keuangan sesuai dengan permasalahan di masing-masing daerah.” (Kusumawati et al., 2024)

Berdasarkan beberapa teori di atas mengenai desentralisasi fiskal dapat disimpulkan bahwa Desentralisasi Fiskal merupakan penyerahan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola

keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan, hak, kewajiban, dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan menghasilkan dampak kebermanfaatan bagi pembangunan-pembangunan di daerah masing-masing (Nadeak et al., 2022; Triwiyanto & Kusumaningrum, 2024; Prasetyo, 2023; Ernita, 2024; Nazikha & Rahmawati, 2021; Kusumawati et al., 2024).

2.1.3.2 Tujuan Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi bertujuan untuk memperluas kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan barang dan jasa publik serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan ekonomi daerah (Sinaga, 2023).

Menurut Suahasil Nazara sebagai Wakil Menteri Keuangan dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia, penerapan Desentralisasi Fiskal memiliki tujuan sebagai berikut (Hariani, 2023):

1. Desentralisasi fiskal harus memperkuat *local taxing power* yang artinya pemerintah daerah harus memiliki koneksi dengan rakyat sebagai pihak yang memberikan penerimaan terhadap negara dengan cara memaksimalkan penggunaan anggaran untuk membiayai pembangunan wilayahnya.
2. Desentralisasi fiskal juga diharapkan dapat membantu meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal dengan cara memberikan pelayanan yang sama sesuai dengan standar minimum di setiap pemerintah daerah.
3. Pelaksanaan desentralisasi fiskal memiliki tujuan lainnya yaitu memberikan keleluasaan belanja daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai

dengan kewenangan dan tanggung jawab untuk mencapai penerapan standar pelayanan minimum.

4. Tujuan penerapan fiskal yang terakhir yaitu menciptakan harmonisasi antara belanja pusat dan daerah agar terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal dan mampu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

2.1.3.3 Pengukuran Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal diukur dengan cara membandingkan antara nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Berikut merupakan formula yang digunakan dalam mengukur desentralisasi fiskal.

$$DF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: (Mahmudi, 2019)

Nilai dari desentralisasi fiskal menunjukkan besaran kontribusi PAD terhadap total pendapatan pemerintah daerah. Semakin tinggi nilai desentralisasi fiskal maka semakin baik pemerintah daerah dalam menjalankan desentralisasinya (Larasati et al., 2025).

2.1.4 Ketergantungan Keuangan Daerah

2.1.4.1 Pengertian Ketergantungan Keuangan Daerah

Ketergantungan Keuangan daerah adalah ukuran tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan optimalisasi pendapatan daerah untuk mendanai program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Rosida & Saepudin, 2024). Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan

pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien untuk mendorong peran serta masyarakat dalam mencapai peningkatan kesejahteraan. Mengukur ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dapat dilakukan dengan mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan ketergantungan keuangan daerah. Beberapa pengertian Ketergantungan keuangan daerah menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:

“Tingkat ketergantungan keuangan daerah adalah yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah provinsi” (Melmambessy, 2022).

“Ketergantungan keuangan daerah berfungsi untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dalam mendanai program dan kegiatan dalam APBD.” (Fathiyah et al., 2022)

“Ketergantungan keuangan daerah yaitu alat untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.” (Rizky et al., 2023)

“Ketergantungan keuangan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan dari pemerintah daerah terhadap bantuan dari pihak eksternal/luar baik yang bersumber dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi.” (Nasution, 2021)

“Ketergantungan keuangan daerah adalah gambaran dari hasil penerapan otonomi daerah yang menginginkan suatu daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menggali potensi dari daerah tersebut dan tidak bergantung dari hasil transfer pemerintah pusat.” (Anggi, 2022)

Berdasarkan beberapa definisi teori di atas mengenai ketergantungan keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa Ketergantungan Keuangan Daerah adalah gambaran mengenai bagaimana pemerintah daerah mampu mengelola keuangan daerah tersebut dan menghasilkan pendapatan asli daerah dengan maksimal serta berupaya mengurangi tingkat ketergantungan atas transfer dari

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Melmambessy, 2022; Fathiyah et al., 2022; Rizky et al., 2023; Nasution, 2021; Anggi, 2022).

2.1.4.2 Pengukuran Ketergantungan Keuangan Daerah

Ketergantungan keuangan daerah dapat diukur melalui perbandingan nilai pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah. Berikut merupakan formula yang digunakan dalam mengukur ketergantungan keuangan daerah:

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: (Mahmudi, 2019)

Nilai ketergantungan keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan daerah untuk tidak bergantung terhadap pemerintah pusat dalam mendanai setiap program dan kegiatan pemerintahannya. Semakin tinggi tingkat ketergantungan keuangan daerah menunjukkan semakin tinggi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Wibawa, G. R., 2021).

2.1.5 Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

2.1.5.1 Pengertian Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas pendapatan asli daerah merupakan angka yang menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan. Kemampuan daerah tersebut dapat dikategorikan efektif apabila dihasilkan mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau seratus (100) persen. Semakin tinggi efektivitas menunjukkan kemampuan daerah yang semakin baik (Melmambessy,

2022). Efektivitas pendapatan asli daerah adalah tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan pemerintah daerah dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan. Efektivitas juga memiliki hubungan dengan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan pemerintah sehingga dengan demikian kemampuan penyediaan layanan oleh pemerintah daerah dapat dikatakan efektif apabila kegiatan yang dilakukan memiliki pengaruh yang besar (Rahayu & Junaidi, 2022). Adapun beberapa pengertian Efektivitas dan Pendapatan menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:

“Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dimana kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir dari kebijakan (*spending wisely*).” (Lona et al., 2023)

“Efektivitas pada dasarnya merupakan pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.” (Simbolon, 2021)

“Efektivitas berkaitan dengan output dan tujuan, maka semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.” (Rahman & Saputra, 2022)

“Efektivitas merupakan indikator untuk mengukur tingkat perbandingan antara realisasi penerimaan dengan potensi penerimaannya. Efektivitas digunakan sebagai ukuran keberhasilan perangkat usaha dan kegiatan untuk mencapai sasaran.” (Tanzil & Juliprijanto, 2021)

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 menyatakan bahwa:

“Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.”

Menurut PSAK Nomor 23 tentang pendapatan menyatakan bahwa:

“pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.”

“Pendapatan adalah hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa di sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Tidak hanya hasil dari penjualan, pendapatan sebuah perusahaan bisa juga berasal dari bunga dari aktiva perusahaan yang digunakan pihak lain, dividen, dan royalti.” (Khaeria et al., 2023)

“Pendapatan (*revenue*) merupakan pendapatan yang diperoleh jangka waktu tertentu. Pendapatan yaitu semua penerimaan dari hasil penjualan barang dan jasa yang didapat dalam unit usaha.” (Ramadhan et al., 2023)

“Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.” (Kemenkeu, DJPK)

“Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.” (Mahmudi, 2019)

Berdasarkan beberapa definisi teori di atas mengenai Efektivitas Pendapatan dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pendapatan merupakan gambaran perbandingan mengenai bagaimana pendapatan asli daerah yang diterima dengan pendapatan asli daerah yang telah dianggarkan atau direncanakan sebelumnya. (Lona et al., 2023; Simbolon, 2021; Rahman&Saputra, 2022; Tanzil & Juliprijanto, 2021; UU No. 1 Tahun 2022; PSAK Nomor 23; Khaeria et al., 2023; Ramadhan et al., 2023; Kemenkeu; Mahmudi, 2019).

2.1.5.2 Pengukuran Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas pendapatan asli daerah dapat diukur dengan cara membandingkan nilai realisasi pendapatan asli daerah dengan nilai pendapatan asli daerah yang dianggarkan. Berikut merupakan formula yang dilakukan untuk mengukur efektivitas pendapatan asli daerah:

$$REP = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: (Mahmudi, 2019)

Menunjukkan tingkat efektivitas pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah melalui nilai target anggaran yang ditentukannya. Semakin tinggi nilai efektivitas pendapatan asli daerah ini maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas yang dicapai suatu pemerintah daerah dalam merealisasikan target anggaran pendapatannya.

2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

2.1.6.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator statistik yang pertama kali di perkenalkan dan dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah dan akan dilakukan pelaporan untuk setiap tahunnya (Nashshar & Mulyana, 2022). IPM diukur melalui tiga unsur pokok dalam kehidupan manusia yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting yang berguna dalam mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia. Melalui IPM dapat dijelaskan bagaimana hasil pembangunan tersebut dapat diakses oleh masyarakat guna memperoleh pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lainnya (Digdowiseiso & Satrio, 2022).

Beberapa pengertian mengenai Indeks Pembangunan Manusia menurut para ahli adalah sebagai berikut:

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah” (Hardana & Nasution, 2022)

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah indikator komposit yang berfungsi untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah melaksanakan upaya dan kebijakan terkait pembangunan manusia utamanya upaya dalam pengurangan kemiskinan, peningkatan mutu sumber daya manusia, serta peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan di suatu daerah” (Winarni et al., 2022)

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak” (S. Astuti & Mispiyanti, 2019)

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di artikan sebagai suatu indeks komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup manusia yang diukur dengan menggunakan suatu indeks untuk masing-masing komponen, yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks standar hidup layak” (Shalihah et al., 2022)

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks gabungan dihitung sebagai rata-rata sederhana dari ketiga indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia untuk mengembangkan pilihannya, yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup.” (Nasyri et al., 2024)

Berdasarkan beberapa definisi teori di atas mengenai Indeks Pembangunan Manusia dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran yang memperlihatkan bagaimana hasil dari penerapan kebijakan mengenai pembangunan manusia untuk memenuhi komponen-komponen indeks pembangunan manusia yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengatasi permasalahan yang bersumber dari permasalahan kualitas penduduk suatu masyarakat. (Hardana & Nasution, 2022; Winarni et al., 2022; Astuti & Mispiyanti, 2019; Shalihah et al., 2022; Nasyri et al., 2024).

2.1.6.2 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa IPM mencerminkan kualitas hidup masyarakat sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah agar lebih terarah untuk mengatasi tantangan-tantangan utama dalam pembangunan, seperti pendidikan rendah, akses kesehatan terbatas, atau ketimpangan ekonomi. Selain itu, IPM menjadi dasar dalam perencanaan penganggaran seperti pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) yang digunakan untuk pembangunan sehingga dana tersebut dapat disalurkan secara efektif ke wilayah yang membutuhkan. IPM juga berfungsi untuk membandingkan tingkat pembangunan antarwilayah, baik di tingkat nasional maupun internasional sehingga dengan demikian dapat mendorong persaingan positif antarwilayah untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan mempercepat pengentasan ketimpangan sosial.

2.1.6.3 Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Dalam menjelaskan gambaran bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan pendidikan, dan sebagainya dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia. Tiga dimensi dasar yang membentuk Indeks Pembangunan Manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Dimensi penyusun Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

1. Umur Harapan Hidup saat Lahir (Umur Panjang dan Hidup Sehat)

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator yang penting untuk mengukur kualitas kesehatan masyarakat dalam suatu wilayah. UHH mencerminkan rata-rata jumlah tahun hidup yang diharapkan oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi bahwa kondisi kesehatan saat ini akan terus berlanjut sepanjang hidupnya. Tujuan pengukuran UHH adalah memberikan gambaran umum mengenai tingkat kesehatan masyarakat, serta efektivitas sistem kesehatan dalam memperpanjang harapan hidup penduduk. UHH juga memiliki fungsi sebagai referensi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang bertujuan untuk melakukan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Adapun UHH dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$I_{UHH} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$$

Sumber: (BPS, 2024)

2. Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah (Pengetahuan)

Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai rata-rata (tahun) sekolah formal yang diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat dalam suatu daerah. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk dengan usia 25 tahun ke atas dalam mengenyam pendidikan formal (Sidabutar et al., 2020). HLS dan RLS memberikan indikasi bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani maka semakin tinggi pula kualitas seseorang

dalam pola pikir maupun tindakannya. Adapun HLS dan RLS dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

Sumber: (BPS, 2024)

Dua variabel yang terdapat dalam dimensi pengetahuan tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} - I_{RLS}}{2}$$

Sumber: (BPS, 2024)

3. Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan (Standar Hidup Layak)
Standar Hidup Layak direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun. Pengukuran dimensi standar hidup layak menurut UNDP menggunakan indikator yang dikenal dengan *real* per kapita GDP *adjusted*. Sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson (Arofah & Rohimah, 2019). Adapun dimensi pengeluaran dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{maks}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}$$

Sumber: (BPS, 2024)

Dari ketiga indeks dimensi tersebut, maka dapat dihitung rata-rata geometriknya untuk menghitung nilai IPM. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{UHH} \times I_{pengetahuan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

Sumber: (BPS, 2024)

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Adapun peneliti-peneliti terdahulu dapat diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Etik Winarni, Rahmi Handayani, & Ahmad Soleh (2022)	Analisis Hubungan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	Variabel Independen: Desentralisasi Fiskal, Ketergantungan Keuangan Daerah, Kemandirian Daerah, Efektivitas PAD, dan Efisiensi PAD Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia	1. Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM 2. Ketergantungan Keuangan Daerah dan Efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM
2	Fadli Ali Taslim dan Rheza Pratama (2021)	Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara	Variabel Independen: Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, dan Efisiensi PAD Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia	1. Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM 2. Efektivitas PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
3	Gian Riksa Wibawa dan Arif (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat	Variabel Independen: Desentralisasi, Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia	1. Desentralisasi memberikan pengaruh positif signifikan pada IPM 2. Ketergantungan Keuangan Daerah memberikan pengaruh negatif signifikan pada IPM
4	Chandra Halim (2020)	Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Ketergantungan, dan Kemandirian Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Timur	Variabel Independen: Desentralisasi Fiskal, Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia	1. Desentralisasi Fiskal berpengaruh namun tidak signifikan dan menunjukkan hubungan negatif terhadap IPM 2. Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan dan menunjukkan hubungan yang positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia
5	Kumba Digdowiseiso dan Muhammad Bahtiar Satrio (2022)	Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Ketergantungan Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2020	Variabel Independen: Kemandirian Keuangan Daerah dan Ketergantungan Fiskal Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia	Ketergantungan Fiskal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM
6	Dendy Indramawan (2018)	<i>The Impacts of Financial Performance of Local Governments on Human Development Index in Papua</i>	Variabel Independen: Desentralisasi Fiskal, Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli	1. Desentralisasi Fiskal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 2. Ketergantungan Keuangan

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
			Daerah (PAD), dan Belanja Modal	Pemerintah Daerah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 3. Efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia
7	Muhsin N. Bailussy (2020)	Kinerja Keuangan Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia: Mediasi Pertumbuhan Ekonomi	Variabel Independen: Kemandirian Keuangan Daerah dan Desentralisasi Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia Variabel Moderasi: Pertumbuhan Ekonomi	Desentralisasi secara langsung berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia
8	Lilik Handayani, Seniorita, Samuel PD Anantadjaya, Henky Hendramawan, dan Hendy Tannady (2023)	<i>Analysis of the Influence of Fiscal Decentralization, Dependency Ratio, and Ratio of Independence on the Human Development Index in East Region of Indonesia</i>	Variabel Independen: Desentralisasi Fiskal, Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia	1. Desentralisasi Fiskal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 2. Ketergantungan Keuangan Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia
9	Nur Fadhila dan Anim Rahmayati (2024)	<i>The Effect of Fiscal Decentralization, GDP Per Capita, Government Expenditure and Corruption on Human Development Index</i>	Variabel Independen: Desentralisasi Fiskal, PDB Per Kapita, Pengeluaran Pemerintah, dan Korupsi Variabel Dependen:	Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
			Indeks Pembangunan Manusia	
10	Susi Astuti dan Mispiananti (2019)	Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia dengan Studi Kasus Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah	Variabel Independen: Kinerja Keuangan, Kemandirian, Efisiensi, Efektivitas, Belanja Operasi, Belanja Modal, Pertumbuhan, Ketergantungan, dan Desentralisasi. Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia	1. Variabel efektivitas tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia 2. Variabel Ketergantungan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia 3. Variabel Desentralisasi memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
11	Nurul Shalihah, Hijri Juliansyah, dan Mutia Rahmah (2021)	Analisis Ketergantungan dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh	Variabel Independen: Ketergantungan Keuangan Daerah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia	Ketergantungan Keuangan Daerah memiliki pengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia
12	Febri Nur Gita Sari dan Ikhsan Budi Riharjo (2020)	Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Timur	Variabel Independen: Desentralisasi, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Efektivitas PAD Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia	1. Desentralisasi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia 2. Efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia
13	Adisa Regita Cahyani, Neli Aida, dan Dedy Yuliawan (2024)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan,	Variabel Independen: Pengeluaran Pemerintah Sektor	Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh negatif

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		Pengeluaran Makanan Perkapita, dan Ketergantungan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Provinsi Lampung	Kesehatan, Pengeluaran Makanan Perkapita, dan Ketergantungan Keuangan Daerah Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia	signifikan terhadap IPM
14	Moch. Rudy Setyawan dan Sjamsul Arief (2019)	Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus 9 Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 - 2017)	Variabel Independen: Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia	Desentralisasi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia
15	Ira Sri Adipura, Sri Rahayui, dan Junaidi (2023)	Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas, dan Efisiensi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016-2019)	Variabel Independen: Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas, dan Efisiensi Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Indonesia	1. Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia 2. Efektivitas berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia
16	Hesty Pradita Putri dan Ichsan (2023)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh	Variabel Independen: Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Desentralisasi Fiskal Variabel Dependen:	Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
			Indeks Pembangunan Manusia	
17	Syahrial Maulana (2023)	Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan	Variabel Independen: Desentralisasi Fiskal dan Ketergantungan Keuangan Daerah Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia	1. Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 2. Ketergantungan Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia
18	Rahmatullah, Ilham (2024)	Analisis Pengaruh Ketergantungan, DAK Fisik Afirmasi, dan PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia Daerah Tertinggal di Provinsi Papua Barat Tahun 2019-2023	Variabel Independen: Ketergantungan, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Produk Domestik Regional Bruto Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia	Variabel Ketergantungan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia
19	Santi Hidayat dan Nenek Woyanti (2021)	Pengaruh PDRB Per Kapita, Belanja Daerah, Ketergantungan, Kemiskinan, dan Teknologi Terhadap IPM di Indonesia	Variabel Independen: PDRB Per Kapita, Belanja Daerah, Ketergantungan, Kemiskinan, dan Teknologi Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia	Variabel Ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM
20	Fikri, Ramadhan (2023)	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, dan Ketergantungan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan	Variabel Independen: Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, dan Ketergantungan	Variabel Ketergantungan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		Manusia Di Provinsi Sumatera Barat	Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia	

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Teori federalisme fiskal menjelaskan mengenai hubungan desentralisasi dengan perekonomian, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Adanya kebijakan desentralisasi diharapkan dapat membangun dan meningkatkan kualitas daerah otonom dalam menjalankan desentralisasinya dengan membangun sumber daya manusia yang berkualitas utamanya dalam peningkatan pembangunan manusia. Desentralisasi fiskal diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk mengurus urusan fiskal daerahnya sendiri yang diharapkan bisa membuat kebijakan sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Melihat sejauh mana upaya pemerintah daerah yang dalam hal ini merupakan daerah otonom dalam menghasilkan pendapatan asli daerah dapat ditunjukkan melalui perhitungan desentralisasi fiskal.

Perhitungan desentralisasi fiskal dapat mengetahui seberapa baik kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan desentralisasi melalui kontribusi pendapatan asli daerah apabila dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diperolehnya. Semakin tinggi nilai desentralisasi fiskal menunjukkan semakin baik desentralisasi yang dilaksanakan suatu pemerintah daerah (Larasati et al.,

2025). Desentralisasi fiskal diharapkan bisa mendorong peningkatan pendapatan yang diterima dan berasal dari daerah tersebut. Apabila pemerintah daerah bisa mengelola potensinya dengan baik maka diharapkan pendapatan daerah bisa mengalami kenaikan juga. Semakin besar pendapatan yang diterima maka diharapkan bisa memberikan dampak terhadap peningkatan nilai indeks pembangunan manusia dengan meningkatkan pelayanan publik secara maksimal dan memperbanyak fasilitas penunjang yang sesuai dengan komponen-komponen pembentuk nilai indeks pembangunan manusia. Apabila nilai desentralisasi fiskal mengalami kenaikan maka berpengaruh terhadap kenaikan nilai indeks pembangunan manusia.

Hal tersebut dibuktikan melalui penelitian yang menyatakan bahwa Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Winarni et al., 2022). Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian yang juga menyatakan bahwa Desentralisasi memberikan pengaruh positif pada Indeks Pembangunan Manusia (Riksa Wibawa et al., 2021).

2.2.2 Pengaruh Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hubungan ketergantungan keuangan daerah dengan teori federalisme fiskal terletak pada pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan potensi dan masalah yang dihadapi suatu daerah. Dengan pelimpahan wewenang ini pemerintah daerah diharapkan dapat menghasilkan pendapatan daerah yang bersumber dari

potensi daerah tersebut secara maksimal sehingga mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat.

Perhitungan nilai ketergantungan keuangan dapat menunjukkan tingkat kemampuan daerah dan ketergantungannya terhadap pemerintah pusat dalam pendanaan setiap program dan kegiatan pemerintahannya. Semakin tinggi tingkat ketergantungan menunjukkan semakin tinggi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Wibawa, G. R., 2021). Tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat menggambarkan bahwa pemerintah daerah kesulitan menghasilkan pendapatan yang berasal dari potensi daerahnya masing-masing. Hal ini justru membuat total pendapatan daerah tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Kurangnya hasil dari pendapatan daerah akan berdampak pada kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan dan pembangunan kualitas manusia dan hal ini akan berpengaruh pada nilai indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu, apabila nilai ketergantungan mengalami penurunan maka akan meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hal tersebut dibuktikan melalui penelitian yang menyatakan bahwa Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap (Digidowiseiso & Satrio, 2022). Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian yang juga menyatakan bahwa Ketergantungan Keuangan Daerah memiliki pengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Cahyani et al., 2024).

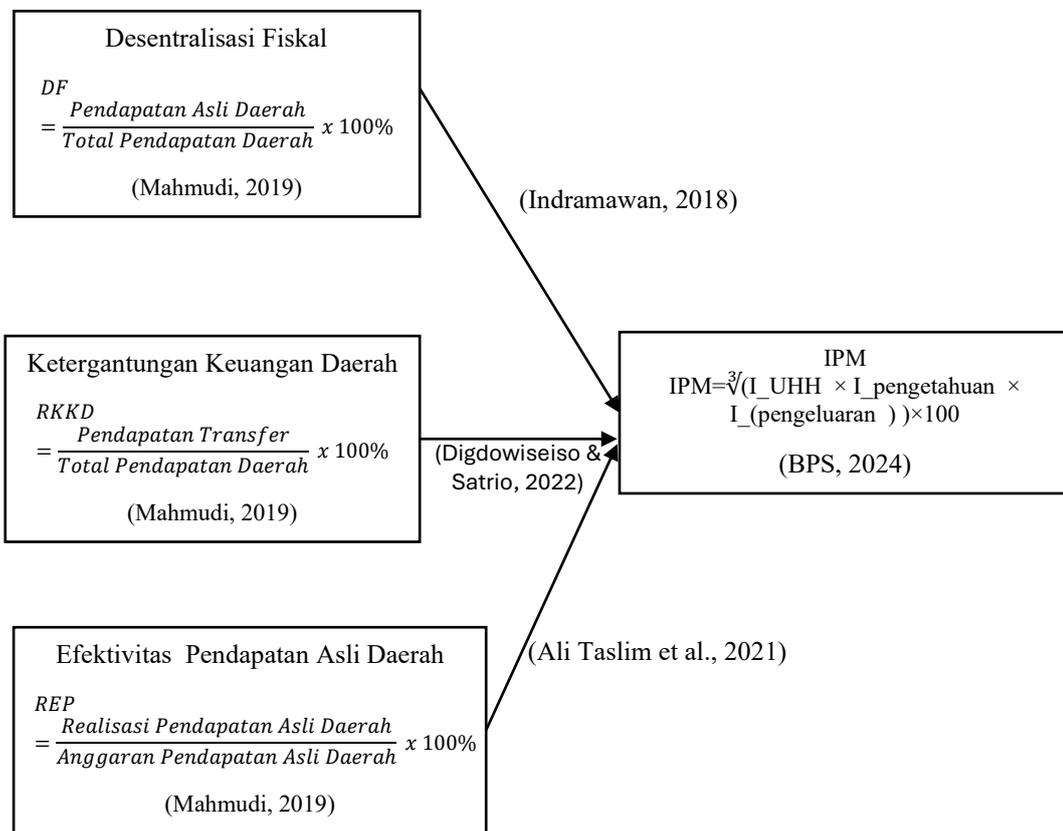
2.2.3 Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hubungan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dengan Teori Federalisme Fiskal adalah bagaimana pemerintah daerah bertindak sesuai dengan arahan yang diberikan pemerintah pusat yang merupakan pemberi arah kebijakan termasuk perihal pengelolaan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukannya. Melalui teori federalisme fiskal pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya secara lebih optimal. Pemerintah daerah dalam hal ini lebih memahami bagaimana karakteristik daerahnya sehingga dengan diberikannya kewenangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan pendapatan karena alokasi anggaran lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya.

Efektivitas pendapatan Asli Daerah merupakan angka yang menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan. Semakin tinggi nilai yang dihasilkan maka semakin efektif daerah tersebut dalam merealisasikan pendapatan (Mahmudi, 2019). Bila efektivitas pendapatan asli daerah tinggi dan sesuai dengan anggaran yang telah dibuat, maka program yang telah direncanakan akan dilaksanakan dengan baik. Tentunya, kebijakan pemerintah daerah yang telah dibuat mengenai pembangunan kualitas manusia dan pelayanan publik dalam hal pembangunan manusia bisa berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, apabila nilai efektivitas pendapatan mengalami kenaikan maka diharapkan akan meningkatkan nilai Indeks pembangunan Manusia (IPM).

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa Efektivitas Pendapatan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y. Astuti et al., 2020). Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa efektivitas pendapatan memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Rahma & Yulianti, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyusun kerangka pemikiran dalam bentuk sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibuat maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis penelitian untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal, ketergantungan daerah, dan efektivitas pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia. Adapun rumusan hipotesis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.

Hipotesis 2 : Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.

Hipotesis 3 : Efektivitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.